

Tantangan dan Peluang Komunikasi DPRD Badung Melalui Media Sosial Terhadap Persepsi Masyarakat

Kadek Darmaastawan¹, I Made Rizal Kurniawan²

¹Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Pendidikan Nasional

²Program Studi Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional

E-mail: darmaastawan@undiknas.ac.id¹, adiboys4171@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengamati penggunaan media sosial oleh DPRD Kabupaten Badung sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, yang menawarkan peluang besar untuk menyampaikan informasi secara efektif namun juga menghadirkan tantangan dalam mengelola respons negatif dan informasi yang tidak akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tantangan dan peluang komunikasi yang dihadapi oleh DPRD serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis konten dari media sosial resmi DPRD Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola umpan balik negatif dan informasi yang tidak akurat yang beredar di media sosial. Media sosial memberikan kesempatan untuk interaksi langsung yang efektif antara DPRD dan masyarakat, namun diperlukan strategi komunikasi yang matang dan terencana untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sementara media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, strategi yang tepat harus diimplementasikan untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan potensi dampak negatif.

Kata kunci: media sosial, komunikasi publik, transparansi, partisipasi masyarakat

Abstract

This study examines the use of social media by the Badung Regency Regional House of Representatives (DPRD) as a communication tool with the public, offering significant opportunities to convey information effectively while also presenting challenges in managing negative responses and inaccurate information. The research aims to evaluate the communication challenges and opportunities faced by the DPRD and their impact on public perception. The research method employed is descriptive qualitative with a case study approach, where data were collected through observation, in-depth interviews, and content analysis of the DPRD Badung's official social media platforms. The findings indicate that social media has significant potential to enhance transparency and public participation in the governance process. However, the main challenge lies in managing negative feedback and the spread of inaccurate information on social media. Social media provides an opportunity for effective direct interaction between the DPRD and the public, but it requires a well-thought-out and planned communication strategy to maintain public trust and reputation. The study concludes that while social media can be a powerful tool for strengthening government-public relations, the right strategies must be implemented to maximize its benefits and minimize potential negative impacts.

Keywords: social media, public communication, transparency, public participation

1. PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi yang paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai platform yang memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat, media sosial menawarkan peluang besar bagi lembaga publik seperti DPRD Kabupaten Badung untuk berkomunikasi secara efektif dengan konstituennya. Menurut [1], media sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan aplikasi berbasis internet yang membangun dasar teknologi Web 2.0, memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna. Media sosial mencakup berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, yang masing-masing memiliki karakteristik dan pengguna yang unik. Keberadaan media sosial telah mengubah cara komunikasi, memungkinkan informasi disampaikan secara cepat dan interaktif, serta memungkinkan umpan balik langsung dari masyarakat.

Di era digital ini, media sosial tidak hanya digunakan untuk berbagi informasi pribadi, tetapi juga sebagai alat strategis bagi organisasi, termasuk lembaga pemerintah, untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh [2], media sosial memungkinkan organisasi untuk membangun kehadiran online yang kuat, mempengaruhi opini publik, dan meningkatkan transparansi. Dalam konteks ini,

DPRD Kabupaten Badung memiliki kesempatan untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan kebijakan, program, dan kegiatan mereka kepada masyarakat, serta menerima masukan dan tanggapan dari publik secara langsung. Namun, penggunaan media sosial oleh lembaga publik seperti DPRD Kabupaten Badung tidak terlepas dari tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola dan menanggapi feedback negatif dari masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh [3], respons yang tidak tepat terhadap kritik dapat merusak reputasi lembaga dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Selain itu, [4] mengemukakan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat atau berita palsu melalui media sosial dapat memperburuk citra lembaga dan memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi tantangan utama dalam memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat adalah akurat dan terpercaya.

Selain itu, adanya kesenjangan digital di antara masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Seperti yang disampaikan oleh [5], perbedaan akses dan kemampuan menggunakan teknologi informasi antara kelompok usia dan sosial ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan dalam partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi politik. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa banyak individu yang belum memahami sepenuhnya bagaimana menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Penelitian oleh [6] menunjukkan bahwa literasi digital yang rendah dapat mengakibatkan kesenjangan dalam akses terhadap informasi yang berkualitas, sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Di sisi lain, tantangan internal seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan media sosial secara efektif oleh anggota DPRD juga menjadi hambatan. Menurut [7], banyak pejabat publik yang masih belum sepenuhnya memahami potensi dan risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial. Kurangnya pelatihan dan strategi komunikasi yang terstruktur dapat mengakibatkan penggunaan media sosial yang tidak optimal, sehingga tujuan komunikasi yang diinginkan tidak tercapai.

Topik ini dibahas karena pentingnya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana media sosial dapat digunakan secara efektif oleh DPRD Kabupaten Badung untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerja dan transparansi lembaga. Sebagaimana diutarakan oleh [8], komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci dalam membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif. Lebih lanjut, [9] menekankan bahwa media sosial, dengan kemampuannya menjangkau audiens yang luas secara instan, dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mengurangi jarak antara pemerintah dan rakyatnya. Penggunaan media sosial yang strategis dapat meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Badung dalam menggunakan media sosial, serta menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Menurut [10], memahami dinamika dan tren penggunaan media sosial adalah langkah penting untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif. Dengan demikian, topik ini tidak hanya relevan tetapi juga krusial untuk memastikan bahwa media sosial digunakan sebagai alat yang positif dalam meningkatkan hubungan antara DPRD dan masyarakat.

Penggunaan media sosial oleh DPRD Kabupaten Badung dapat memberikan dampak langsung terhadap persepsi masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh [11], komunikasi yang transparan dan terbuka melalui media sosial dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam proses politik. Di sisi lain, mismanajemen media sosial dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan dan bahkan krisis reputasi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi DPRD Kabupaten Badung dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif, transparan, dan responsif.

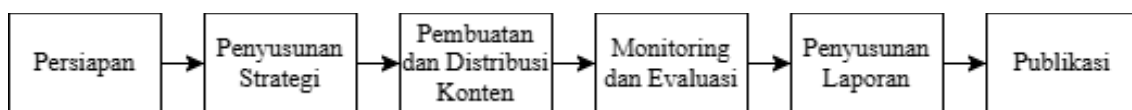
Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang akan membantu DPRD Kabupaten Badung dalam merancang kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh [12], penggunaan teknologi komunikasi yang cerdas dapat memperkuat demokrasi dan mendorong partisipasi warga negara dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, membahas topik ini tidak hanya penting untuk DPRD Kabupaten Badung, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal dan nasional.

Berkaitan dengan perihal tersebut maka kali ini penulis akan membuat penelitian berkaitan dengan judul ” **Tantangan dan Peluang Komunikasi DPRD Kabupaten Badung Melalui Media Sosial Terhadap Persepsi Masyarakat**”.

2. METODE

Dalam konteks pemerintahan, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai platform untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah, termasuk DPRD, memungkinkan mereka untuk menjalin komunikasi dua arah yang lebih efektif. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. (Wibowo, 2020) menekankan bahwa keterlibatan pemerintah dalam media sosial dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam komunikasi DPRD Kabupaten Badung melalui media sosial serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif, membangun transparansi, serta meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Gambar 1 menyajikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi persiapan, penyusunan strategi, pembuatan dan distribusi konten, monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan, dan publikasi.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan tahap persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini, tim kerja yang terdiri dari anggota DPRD, staf IT, dan ahli komunikasi akan mengidentifikasi tujuan program dan target audiens yang ingin dicapai. Rapat koordinasi awal diadakan untuk menyamakan persepsi dan membagi tugas secara jelas di antara tim. Pada tahap ini juga disusun jadwal kegiatan dan anggaran yang diperlukan. Dokumentasi persiapan meliputi penggunaan laptop atau komputer, akses internet yang stabil, serta alat tulis dan kertas untuk mencatat rencana dan ide yang muncul selama rapat.

Setelah persiapan, langkah berikutnya adalah penyusunan strategi komunikasi media sosial. Tim akan menganalisis platform media sosial yang paling efektif, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Selain itu, tim akan menentukan jenis konten yang akan dipublikasikan, apakah berupa infografis, video, atau artikel, dan menyusun kalender editorial untuk mengatur jadwal posting. Panduan penggunaan media sosial juga akan dibuat untuk memastikan bahwa semua anggota DPRD dan staf terkait memahami cara menggunakan media sosial dengan efektif. Dokumentasi pada tahap ini mencakup panduan penggunaan media sosial, perangkat lunak desain grafis seperti Adobe Photoshop atau Canva, dan perangkat lunak manajemen media sosial seperti Hootsuite atau Buffer.

Tahap ketiga adalah pembuatan dan distribusi konten. Tim akan membuat konten yang informatif dan menarik sesuai dengan strategi yang telah disusun. Ini termasuk melakukan sesi foto dan video terkait kegiatan DPRD, serta mengunggah konten tersebut secara rutin sesuai dengan kalender editorial. Tim juga bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dan berinteraksi dengan masyarakat melalui komentar dan pesan langsung di media sosial. Dokumentasi yang diperlukan meliputi kamera dan alat perekam video, perangkat lunak pengeditan video seperti Adobe Premiere atau Final Cut Pro, serta template desain untuk infografis dan gambar media sosial.

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap penting untuk mengukur efektivitas program. Tim akan memantau respons dan interaksi masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan, mengumpulkan data statistik dari platform media sosial, serta melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Rapat evaluasi akan diadakan untuk membahas hasil dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitas program. Alat analitik media sosial seperti Facebook Insights atau Twitter Analytics, kuesioner survei, dan laporan monitoring dan evaluasi akan digunakan sebagai dokumentasi pada tahap ini.

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan dan publikasi hasil kegiatan. Tim akan menyusun laporan akhir mengenai pelaksanaan program dan pencapaian yang telah diraih, kemudian membagikannya kepada anggota DPRD dan pihak terkait. Hasil kegiatan juga akan dipublikasikan melalui media sosial dan website resmi DPRD Kabupaten Badung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dokumentasi yang diperlukan pada tahap ini meliputi laporan tertulis, alat presentasi seperti PowerPoint, dan platform publikasi seperti media sosial dan website resmi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Permasalahan

Penggunaan media sosial oleh DPRD Kabupaten Badung mengalami berbagai tantangan signifikan. Menurut data dari 2019, banyak anggota DPRD yang masih kurang familiar dengan penggunaan media sosial secara efektif. Hal ini mengakibatkan komunikasi yang tidak maksimal dengan masyarakat, khususnya dengan pedagang kaki lima (PKL) [13]. Sementara itu, pada tahun 2020, tantangan ini semakin kompleks dengan meningkatnya jumlah informasi yang beredar di media sosial, membuat DPRD kesulitan untuk menonjolkan pesan mereka di antara berbagai sumber informasi yang ada [14].

Pada tahun 2021, DPRD Kabupaten Badung mulai mengadaptasi strategi komunikasi melalui media sosial dengan lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat PKL melalui konten yang lebih relevan dan berbasis kebutuhan lokal. Meskipun ada peningkatan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal mengelola feedback yang sering kali bersifat negatif atau tidak konstruktif [15].

Salah satu peluang utama dalam komunikasi DPRD melalui media sosial adalah meningkatnya kesadaran dan penerimaan masyarakat PKL terhadap komunikasi digital. Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa sebagian besar PKL di Kabupaten Badung semakin menerima dan menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Penerimaan ini membuka peluang bagi DPRD untuk menjangkau PKL dengan cara yang lebih langsung dan persona.

Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat PKL terhadap DPRD. Penelitian dari 2023 menunjukkan bahwa PKL yang aktif berinteraksi di media sosial cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kebijakan dan program DPRD dibandingkan dengan mereka yang tidak berinteraksi secara aktif [16]. Ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk membentuk persepsi positif jika digunakan dengan strategi yang tepat.

Meskipun ada peluang, terdapat keterbatasan dalam strategi komunikasi digital DPRD. Pada tahun 2021, ditemukan bahwa ketidakmampuan dalam mengukur dampak komunikasi dan kurangnya sumber daya untuk pengelolaan media sosial merupakan masalah utama [17]. Masalah ini menghambat efektivitas pesan dan mengurangi dampak dari komunikasi yang dilakukan. DPRD Kabupaten Badung telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan komunikasi digital dengan PKL, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Inisiatif tersebut termasuk pelatihan digital bagi anggota DPRD dan kampanye informasi yang lebih terstruktur di media sosial [14]. Meskipun demikian, evaluasi dari program ini menunjukkan perlunya penyesuaian strategi untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat PKL [15].

Secara keseluruhan, media sosial menawarkan peluang besar untuk DPRD Kabupaten Badung dalam berkomunikasi dengan masyarakat PKL, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, disarankan agar DPRD terus mengembangkan strategi media sosial yang lebih terintegrasi, melibatkan PKL secara aktif, dan mengatasi tantangan dalam pengelolaan serta evaluasi dampak komunikasi [18]. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan adaptif, DPRD dapat memanfaatkan media sosial secara optimal untuk meningkatkan hubungan dan persepsi masyarakat PKL.

3.2 Pembahasan

Media sosial telah menjadi platform komunikasi yang esensial dalam kehidupan modern. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. Penggunaan media sosial telah meluas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan komunikasi publik. Di Indonesia, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter telah menjadi alat utama untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Di era digital ini, keterlibatan pemerintah dalam media sosial tidak hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun transparansi dan partisipasi publik. Media sosial memungkinkan pemerintah untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan warganya, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Media sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemerintah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah.

Identifikasi Peluang Penggunaan Media Sosial oleh DPRD Kabupaten Badung DPRD Kabupaten Badung dapat memanfaatkan media sosial untuk mengatasi beberapa tantangan dalam komunikasi dengan masyarakat. Pertama, media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dengan membagikan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan DPRD secara real-time. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang akurat dan terkini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.

Kedua, media sosial memungkinkan interaksi langsung antara DPRD dan masyarakat. Interaksi ini dapat berupa diskusi online, jajak pendapat, atau sesi tanya jawab yang dilakukan

secara berkala. Dengan adanya komunikasi dua arah ini, DPRD dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih baik, serta menerima masukan yang konstruktif untuk perbaikan kinerja. Namun, penggunaan media sosial juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Untuk mengatasi hal ini, DPRD perlu memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan melalui media sosial telah diverifikasi dengan baik dan berasal dari sumber yang terpercaya. Selain itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk mengelola dan merespons komentar atau kritik dari masyarakat secara profesional dan bijaksana.

media sosial oleh DPRD Kabupaten Badung memiliki peluang besar untuk meningkatkan komunikasi dan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja DPRD. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Media sosial dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Badung melalui media sosial. Melalui tahapan yang telah direncanakan, yaitu persiapan dan perencanaan, penyusunan strategi komunikasi, pembuatan dan distribusi konten, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan dan publikasi hasil kegiatan, diharapkan dapat terlihat perubahan yang signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dan menilai kinerja DPRD.

Persepsi masyarakat terhadap komunikasi pemerintah melalui media sosial sangat penting untuk diukur karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi komunikasi yang telah diterapkan. Dengan memahami persepsi ini, DPRD Kabupaten Badung dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam menyampaikan informasi, membangun transparansi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan serta kondisi sebelum dan sesudah kegiatan.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Sesudah Kegiatan
1	Persiapan dan Perencanaan	Tidak ada rencana terstruktur, minim koordinasi	Tim terbentuk, tujuan dan target audiens jelas
2	Penyusunan Strategi Komunikasi Media Sosial	Tidak ada strategi komunikasi yang spesifik	Strategi dan panduan penggunaan media sosial tersedia
3	Pembuatan dan Distribusi Konten	Konten tidak konsisten, minim interaksi	Konten terjadwal dan menarik, interaksi meningkat
4	Monitoring dan Evaluasi	Tidak ada monitoring, evaluasi tidak terstruktur	Monitoring rutin, data statistik dan survei tersedia
5	Penyusunan Laporan dan Publikasi Hasil	Tidak ada laporan sistematis, minim publikasi	Laporan terstruktur, publikasi melalui media sosial

Sebelum pelaksanaan kegiatan, tahap persiapan dan perencanaan menunjukkan kurangnya rencana terstruktur dan minimnya koordinasi antar anggota DPRD dan staf terkait. Situasi ini menyebabkan pelaksanaan program yang tidak efisien dan tujuan yang tidak jelas. Namun, setelah kegiatan, tim kerja berhasil terbentuk dengan tujuan dan target audiens yang jelas. Hal ini memungkinkan pelaksanaan program berjalan lebih efektif, dengan setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab mereka.

Pada tahap penyusunan strategi komunikasi media sosial, sebelumnya tidak ada strategi komunikasi yang spesifik untuk media sosial. Akibatnya, penggunaan media sosial tidak optimal dan tidak terarah. Setelah kegiatan, strategi komunikasi yang jelas dan panduan penggunaan media sosial telah tersedia. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi tim dalam mengelola media sosial, memastikan bahwa setiap postingan dan interaksi dilakukan dengan tujuan yang spesifik dan terukur.

Pembuatan dan distribusi konten juga mengalami perbaikan signifikan. Sebelum kegiatan, konten yang dipublikasikan tidak konsisten dan interaksi dengan masyarakat sangat minim. Ini menyebabkan kurangnya engagement dan rendahnya persepsi positif masyarakat

terhadap DPRD. Namun, setelah kegiatan, konten dipublikasikan secara terjadwal dan menarik, yang menghasilkan peningkatan interaksi dengan masyarakat. Konten yang terstruktur dan menarik berhasil menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam diskusi dan aktivitas DPRD.

Monitoring dan evaluasi yang sebelumnya tidak terstruktur juga menjadi lebih sistematis setelah kegiatan. Sebelum kegiatan, tidak ada monitoring yang dilakukan, sehingga tidak ada data yang bisa digunakan untuk evaluasi dan perbaikan. Setelah kegiatan, monitoring dilakukan secara rutin dengan menggunakan alat analitik media sosial. Data statistik dan hasil survei kepuasan masyarakat dikumpulkan dan dianalisis untuk mengukur efektivitas komunikasi. Ini memungkinkan tim untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan dan terus meningkatkan strategi komunikasi mereka.

Akhirnya, penyusunan laporan dan publikasi hasil kegiatan juga mengalami perbaikan. Sebelum kegiatan, tidak ada laporan yang sistematis dan publikasi hasil kegiatan sangat minim, yang mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Setelah kegiatan, laporan disusun dengan baik dan hasil kegiatan dipublikasikan melalui media sosial dan website resmi DPRD. Ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.

Melalui tahapan pelaksanaan kegiatan ini, terlihat adanya peningkatan dalam berbagai aspek komunikasi DPRD Kabupaten Badung melalui media sosial. Perubahan positif ini mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan dan menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi publik dalam pemerintahan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

DPRD Kabupaten Badung menghadapi berbagai tantangan dalam memanfaatkan media sosial untuk komunikasi, seperti minimnya pemahaman anggota DPRD tentang platform tersebut dan kesulitan dalam mengelola umpan balik negatif dari masyarakat. Namun, laporan ini juga mengidentifikasi peluang signifikan untuk meningkatkan komunikasi dan membangun persepsi positif masyarakat terhadap DPRD. Dengan menerapkan strategi yang lebih terstruktur, menciptakan konten yang relevan dan interaktif, serta melakukan monitoring dan evaluasi yang sistematis, DPRD dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Implementasi program ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam interaksi dan persepsi masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan terhadap kinerja DPRD Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. M. & H. M. Kaplan, "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. .," *Business Horizons*, vol. 53(1), pp. 59-68, 2019.
- [2] J. H. H. K. M. I. P. & S. B. S. Kietzmann, "Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media.," *Business Horizons*, , Vols. 54(3), , pp. 241-251., 2019.
- [3] M. A. S. D. A. & I. S. Cacciatore, "The End of Framing as We Know It and the Future of Media Effects.," *Journal of Communication*, , Vols. 70(2), , pp. 407-413. , 2020.
- [4] D. A. & D. J. Graber, *Mass Media and American Politics.*, CQ Press., 2021.
- [5] P. & I. R. Norris, *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism.*, Cambridge University Press., 2019.
- [6] A. J. A. M. & H. E. J. Van Deursen, "The Third-Level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online?. Communication and Information Technologies Annual," Vols. 10(2),, pp. 29-52., 2020.

- [7] S. & K. R. M. Dewan, "The Role of Social Media in Local Government. Government Information Quarterly," vol. 36(3), pp. 400-409., 2019.
- [8] D. McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory.*, SAGE Publications., 2020.
- [9] E. Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life.*, Doubleday Anchor Books., 2021.
- [10] D. M. & E. N. B. Boyd, "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship," *Journal of Computer-Mediated Communication.*, vol. 13(1), pp. 210-230., 2020.
- [11] G. Meikle, *Social Media: Communication, Sharing and Visibility.*, Routledge., 2020.
- [12] M. Castells, *Communication Power.*, Oxford University Press., 2020.
- [13] B. Hendrawan, *Tantangan komunikasi DPRD melalui media sosia*, Bali: Universitas Bali., 2019.
- [14] E. Wibowo, *Media sosial sebagai alat komunikasi pemerintah*, Malang, 2020.
- [15] A. Fadilah, *Pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat*, Surabaya, 2023.
- [16] C. Setiawan, *Interaksi media sosial dan persepsi masyarakat*, Bandung, 2023.
- [17] B. Hendrawan, *Strategi komunikasi digital DPRD Kabupaten Badung.*, Yogyakarta, 2021.
- [18] C. Setiawan, *Interaksi media sosial dan persepsi masyarakat*, Bandung, 2023.